STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Angelia Cristabela
NPP. 33.0496
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: angeliabela75@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Piet Hein Pusung, S.STP., M.Si
Email: ppusung@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The activation rate of Digital Population Identity (IKD) in Bantul Regency has not yet reached the national target of 30%, despite experiencing significant growth in recent years. This condition indicates that various challenges remain in the implementation of IKD activation and require appropriate strategic efforts to increase public participation.* ***Purpose:*** *This study aims to describe the strategy implemented by the Department of Population and Civil Registration of Bantul Regency in increasing the activation of IKD.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using Wheelen and Hunger's Strategic Management Theory, which consists of environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, and evaluation and control. The analysis process was supported by NVivo 12 Plus through a systematic coding process that generated word frequency and hierarchy chart analyses.* ***Result:*** *The findings indicate that the strategies implemented include mobile outreach services, direct public socialization, the utilization of digital media, activation service points, and cross-sector collaboration. Among these strategies, mobile outreach services were found to be the most effective because they directly reached the community. However, IKD activation still faces several challenges, including low levels of digital literacy, limited internet access and supporting devices, concerns regarding personal data security, budget constraints, and limited human resources.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the strategy implemented by the Department of Population and Civil Registration of Bantul Regency has been fairly effective and has followed the stages of strategic management systematically. This is evidenced by the increase in DPI activation from approximately 4,07% in 2023 to 22.03% in 2025. Nevertheless, the strategy has not yet been optimal, as the achievement remains below the national target of 30% and continues to be influenced by various internal and external constraints.*

Keywords: *Digital Population Identity (IKD), IKD Activation, Strategy.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bantul belum mencapai target nasional sebesar 30%, meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan aktivasi IKD yang memerlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam meningkatkan aktivasi IKD. **Metode:** kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori Manajemen Strategi Wheelen dan Hunger yang meliputi pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol. Proses analisis data didukung oleh aplikasi NVivo 12 Plus melalui tahapan coding yang menghasilkan analisis word frequency dan hierarchy chart. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi pelayanan jemput bola, sosialisasi langsung kepada masyarakat, pemanfaatan media digital, penyediaan titik layanan aktivasi, serta kerja sama lintas sektor. Strategi jemput bola menjadi strategi yang paling efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara langsung. Namun, pelaksanaan aktivasi IKD masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan jaringan internet dan perangkat pendukung, kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi, keterbatasan anggaran, serta jumlah pegawai yang terbatas. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam meningkatkan aktivasi IKD telah berjalan cukup baik melalui tahapan manajemen strategi yang sistematis. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan capaian aktivasi IKD dari sekitar 4,07% pada tahun 2023 menjadi 22,03% pada tahun 2025. Meskipun demikian, strategi yang diterapkan belum optimal karena capaian tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 30% dan masih dipengaruhi oleh berbagai kendala internal maupun eksternal.

Kata kunci: Aktivasi IKD, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Strategi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di era modern. Transformasi digital mendorong pemerintah beralih dari sistem manual menuju pelayanan berbasis elektronik yang cepat, transparan, dan efisien. Digitalisasi menjadi pendorong utama terjadinya transformasi, tidak hanya transformasi dalam sektor ekonomi tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh (Jane Giroth et al., 2023). Transformasi digital tidak hanya mencakup adopsi teknologi baru, tetapi juga melibatkan perubahan organisasi, proses bisnis, serta budaya kerja untuk menciptakan nilai publik yang lebih baik (Irani et al., 2023). Keberhasilan transformasi digital pemerintahan dipengaruhi oleh fleksibilitas organisasi, dukungan kebijakan, serta kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan teknologi dengan proses administrasi yang ada. Transformasi digital memungkinkan pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Gong et al., 2020).

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan digital government telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan berbagai inovasi pelayanan berbasis teknologi. Digital government merupakan suatu pendekatan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta efektivitas pengambilan keputusan. Digital government tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan yang sudah ada, tetapi juga mendorong transformasi cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, menciptakan layanan yang lebih terintegrasi, proaktif, dan berorientasi

pada kebutuhan warga(Scholta & Lindgren, 2023). Pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan terintegrasi (Scholl, 2021). Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah berupaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Pemanfaatan layanan publik digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan nilai publik dan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah (Luna et al., 2024).

Reformasi birokrasi memerlukan lima elemen kunci: merancang ulang layanan publik secara radikal untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi biaya, merestrukturisasi pendekatan pemerintah dalam mengelola keuangan publik, serta memperkuat kepemimpinan fungsional dan kemampuan di seluruh pemerintah (Simangunsong, 2020). Transformasi digital menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia karena dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD merupakan identitas elektronik yang memuat data kependudukan dan dapat diakses melalui telepon pintar. Direktorat Jenderal Dukcapil menargetkan aktivasi IKD mencapai 30% pada tahun 2024–2025(Intan, 2024). Namun, berdasarkan data Ditjen Dukcapil per 1 Agustus 2025, capaian nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baru mencapai 7,60% atau sekitar 15,6 juta penduduk wajib KTP, sehingga target tersebut masih belum tercapai.

Di tingkat daerah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi kedua tertinggi secara nasional dalam capaian aktivasi IKD setelah DKI Jakarta. Meski demikian, persentasenya masih tergolong rendah dibandingkan target nasional. Di antara kabupaten/kota di DIY, Kabupaten Bantul menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yaitu 22,03% atau sekitar 167.611 jiwa dari total penduduk wajib KTP (Haryono et al., 2025). Capaian tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang masih berada pada angka sekitar 4,07%. Peningkatan ini didorong oleh berbagai upaya, seperti sosialisasi kepada masyarakat dan strategi jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan berbasis teknologi informasi memerlukan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lokal. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif melalui terjun langsung ke desa/kelurahan, kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal, serta pemanfaatan media sosial berhasil meningkatkan adopsi layanan digital di masyarakat(Hutasoit et al., 2020). Pembangunan dan layanan publik yang efektif memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan pendekatan berbasis kebutuhan lokal. Transformasi digital harus disesuaikan dengan karakteristik lokal agar dapat diterima dan digunakan secara optimal oleh masyarakat. Transformasi digital tidak hanya berperan sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi administratif, melainkan juga sebagai strategi jangka panjang guna memperluas jangkauan dan kualitas layanan publik. Penerapan e-government yang efektif memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara daring, mengatasi hambatan geografis, serta mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik(Simangunsong & Hutasoit, 2011).

Meskipun menunjukkan perkembangan positif, capaian aktivasi IKD di Kabupaten Bantul masih berada di bawah target nasional sebesar 30%. Kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji karena Kabupaten Bantul mampu meningkatkan capaian aktivasi dalam waktu yang relatif singkat melalui berbagai strategi yang diterapkan. Selain itu, penelitian mengenai strategi peningkatan aktivasi IKD masih terbatas dan umumnya hanya membahas implementasi maupun faktor pendukung dan penghambat program. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan strategi yang diterapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan belum tercapainya target nasional aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 30% di Kabupaten Kabupaten Bantul. Meskipun Kabupaten Bantul menjadi daerah dengan capaian aktivasi IKD tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, persentase aktivasi yang dicapai masih berada pada angka 22,03%, sehingga target nasional belum terpenuhi. Rendahnya capaian aktivasi IKD dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan perangkat gawai, keterbatasan jaringan internet, serta kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas pelayanan juga menjadi hambatan dalam memperluas jangkauan aktivasi IKD kepada masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian aktivasi IKD, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pelayanan jemput bola, penyediaan titik layanan aktivasi, serta pemanfaatan media digital. Strategi tersebut mampu meningkatkan capaian aktivasi IKD secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat, dari sekitar 4,07% pada tahun 2023 menjadi 22,03% pada tahun 2025. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika strategi pelayanan publik berbasis digital yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas implementasi IKD, efektivitas pelayanan, serta faktor pendukung dan penghambat aktivasi IKD di berbagai daerah, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan aktivasi IKD menggunakan pendekatan manajemen strategi yang sistematis. Penelitian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada aspek pelaksanaan program dan pelayanan administrasi kependudukan, sedangkan penelitian mengenai proses pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol dalam peningkatan aktivasi IKD masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mendeskripsikan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital secara lebih komprehensif.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan publik yang bertujuan menciptakan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Meskipun Kabupaten Bantul menjadi daerah dengan capaian aktivasi IKD tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, persentase aktivasi yang dicapai masih belum memenuhi target nasional sebesar 30%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan aktivasi IKD, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan perangkat dan jaringan internet, serta kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai strategi yang diterapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam meningkatkan aktivasi IKD melalui sosialisasi, pelayanan jemput bola, penyediaan titik layanan, dan pemanfaatan media digital. Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi akademis karena masih terbatasnya penelitian yang membahas strategi peningkatan aktivasi IKD dengan pendekatan manajemen strategi secara sistematis. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah akan mengalami keterbatasan informasi dalam memahami strategi yang efektif untuk meningkatkan aktivasi IKD, sehingga upaya percepatan transformasi digital administrasi kependudukan berpotensi berjalan kurang optimal dan target nasional aktivasi IKD akan sulit tercapai.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas IKD dan strategi pelayanan administrasi kependudukan. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam percepatan aktivasi IKD di Kota Surabaya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada strategi percepatan aktivasi IKD dan kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi jemput bola menjadi upaya yang efektif dalam meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD (Putri et al., 2025). Implementasi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan bantuan NVivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur, kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta prosedur aktivasi yang masih mengharuskan masyarakat datang ke kantor pelayanan (Ahmadi et al., 2025). Efektivitas pelayanan pembuatan IKD di Kabupaten Cianjur menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan IKD tergolong cukup efektif meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya(Nuraeni & Syahrudin, 2024).

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai IKD dan pelayanan administrasi kependudukan didominasi oleh metode kualitatif dengan fokus pada implementasi IKD, efektivitas pelayanan, serta strategi pemerintah dalam penerapan layanan digital kependudukan. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan aktivasi IKD menggunakan pendekatan Manajemen Strategi Wheelen dan Hunger masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena menitikberatkan pada analisis strategi Disdukcapil Kabupaten Bantul dalam meningkatkan aktivasi IKD melalui tahapan pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dilihat dari konteks objek penelitian, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang memiliki capaian aktivasi IKD tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun masih belum mencapai target nasional sebesar 30%. Kondisi tersebut menarik untuk diteliti karena Kabupaten Bantul menunjukkan peningkatan capaian aktivasi IKD yang signifikan dari 4,07% pada tahun 2023 menjadi 22,03% pada tahun 2025. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada implementasi kebijakan, efektivitas pelayanan, dan strategi pelayanan administrasi kependudukan, penelitian ini secara khusus mengkaji strategi peningkatan aktivasi IKD.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori Manajemen Strategi yang dikemukakan oleh Wheelen dan Hunger yang meliputi pemindaian lingkungan (environmental scanning), perumusan strategi (strategy formulation), implementasi strategi (strategy implementation), serta evaluasi dan kontrol (evaluation and control). Penggunaan teori tersebut menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menggunakan teori implementasi kebijakan atau efektivitas pelayanan publik. Dari segi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung dengan analisis data menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus melalui proses *coding*, *word frequency*, dan *hierarchy chart*, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai strategi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam meningkatkan aktivasi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami secara mendalam strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pendekatan kualitatif dinilai sesuai karena mampu menggali informasi secara komprehensif mengenai proses pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol yang dilakukan dalam pelaksanaan program aktivasi IKD. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman informan terhadap program aktivasi IKD.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yang terdiri atas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Operator Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, enam orang masyarakat yang telah melakukan aktivasi IKD, serta enam orang masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dipilih sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan, perencanaan, serta pengawasan pelaksanaan program aktivasi IKD.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus untuk membantu proses pengolahan dan analisis data kualitatif. Analisis dilakukan melalui proses coding terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis word frequency dan hierarchy chart untuk mengidentifikasi tema-tema yang dominan serta hubungan antarindikator dalam strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam meningkatkan aktivasi IKD. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus melalui proses coding untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari hasil penelitian. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk word frequency dan hierarchy chart yang diinterpretasikan berdasarkan teori Manajemen Strategi Wheelen dan Hunger yang meliputi pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada capaian aktivasi IKD Kabupaten Bantul yang merupakan tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun masih belum mencapai target nasional sebesar 30%, sehingga menarik untuk diteliti dari perspektif manajemen strategi. Penelitian dilaksanakan selama kegiatan penelitian lapangan pada tahun 2025 yang meliputi observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan aktivasi IKD.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mendeskripsikan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menggunakan teori Manajemen Strategi yang dikemukakan oleh Wheelen dan Hunger. Teori tersebut terdiri atas empat tahapan, yaitu pemindaian lingkungan (*environmental scanning*), perumusan strategi (*strategy formulation*), implementasi strategi (*strategy implementation*), serta evaluasi dan kontrol (*evaluation and control*) yang dianalisis menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus.

3.1 Hasil Analisis Data Menggunakan NVivo 12 Plus

Untuk memperkuat hasil penelitian, analisis datadilakukan dengan menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah diperoleh selama penelitian. Analisis dilakukan melalui fitur *Word Frequency Query* dan *Hierarchy Chart* untuk mengidentifikasi tema-tema yang paling dominan terkait strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Gambar 3.1

Hasil *Word Frequency Query* Analisis Nvivo 12 Plus



Sumber: Aplikasi Nvivo 12 Plus, 2026

Berdasarkan Gambar 3.1, kata yang paling dominan muncul dalam data penelitian adalah *aktivasi*, *masyarakat*, *pelayanan*, *sosialisasi*, *dengan*, *untuk*, dan *dalam*. Dominasi kata-kata tersebut menunjukkan bahwa fokus utama pelaksanaan program IKD di Kabupaten Bantul berkaitan dengan upaya peningkatan aktivasi melalui pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Selain itu, kemunculan kata pelayanan dan masyarakat yang cukup tinggi mengindikasikan bahwa strategi yang diterapkan berorientasi pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Gambar 3.2

Hasil *Hierarchy Chart* Analisis Nvivo 12 Plus

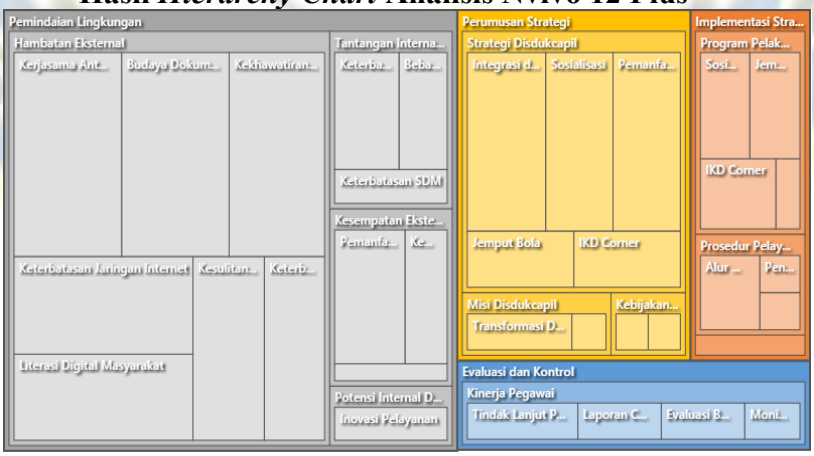

Sumber: Aplikasi Nvivo 12 Plus, 2026

Berdasarkan Gambar 3.2, hasil analisis NVivo menunjukkan bahwa data penelitian dapat dikelompokkan ke dalam empat tahapan manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger, yaitu pemindaian lingkungan (*environmental scanning*), perumusan strategi (*strategy formulation*), implementasi strategi (*strategy implementation*), serta evaluasi dan kontrol (*evaluation and control*). Pada dimensi pemindaian lingkungan ditemukan tema hambatan eksternal, tantangan internal, kesempatan eksternal, dan potensi internal organisasi. Pada dimensi perumusan strategi ditemukan tema strategi Disdukcapil, misi organisasi, dan kebijakan yang mendukung aktivasi IKD. Selanjutnya, pada dimensi implementasi strategi ditemukan tema program pelaksanaan dan prosedur pelayanan, sedangkan pada dimensi evaluasi dan kontrol ditemukan tema monitoring, evaluasi berkala, laporan capaian, dan tindak lanjut program. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam pembahasan strategi peningkatan aktivasi IKD yang akan diuraikan berdasarkan masing-masing dimensi teori Wheelen dan Hunger.

3.2. Pemindaian Lingkungan (Environmental Scanning)

Tabel 3.1
Hasil Analisis Dimensi Pemindaian Lingkungan

No	Dimensi	Temuan Utama	Sumber Data
1.	Peluang eksternal	Dukungan kebijakan SPBE, target nasional IKD, dan tingginya penggunaan smartphone masyarakat.	Wawancara dan dokumentasi
2.	Ancaman eksternal	Keterbatasa internet, gawai, dan kekhawatiran keamanan data pribadi.	Wawancara, observasi dan dokumentasi
3.	Kekuatan eksternal	Adanya program jemput bola, dukungan pimpinan, dan pemanfaatan media digital.	Wawancara dan dokumentasi
4.	Kelemahan eksternal	Keterbatasan jumlah petugas dan anggaran operasional.	Data SDM dan anggaran Disdukcapil Bantul

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul melakukan pemindaian lingkungan sebagai langkah awal dalam merumuskan strategi peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pemindaian lingkungan dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Hasil identifikasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan kondisi organisasi dan karakteristik masyarakat Kabupaten Bantul. Ringkasan hasil analisis pemindaian lingkungan dapat dilihat pada Tabel 3.1 yang menunjukkan adanya peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan yang memengaruhi pelaksanaan aktivasi IKD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), terdapat sejumlah peluang yang mendukung keberhasilan program aktivasi IKD. Peluang tersebut berasal dari faktor eksternal, yaitu adanya kebijakan pemerintah pusat yang mendorong transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penerapan Identitas Kependudukan Digital secara nasional. Selain itu, dukungan dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melalui penyediaan sistem, regulasi, dan target aktivasi menjadi faktor yang memperkuat pelaksanaan program di daerah. Disdukcapil Kabupaten Bantul juga menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, maupun organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan layanan aktivasi IKD.

Disdukcapil Kabupaten Bantul memiliki beberapa kekuatan yang mendukung peningkatan aktivasi IKD. Salah satu kekuatan utama adalah adanya program jemput bola yang secara aktif mendatangi masyarakat di berbagai lokasi pelayanan publik, instansi pemerintah, sekolah, maupun kegiatan masyarakat lainnya. Strategi ini dinilai efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara langsung tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil. Selain itu, dukungan pimpinan dalam mendorong percepatan aktivasi IKD serta pemanfaatan media digital seperti Instagram, TikTok, dan website resmi Disdukcapil Bantul menjadi sarana yang efektif dalam menyebarluaskan informasi mengenai manfaat, tata cara, dan pentingnya aktivasi IKD kepada masyarakat.

Meskipun memiliki berbagai peluang dan kekuatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Ancaman tersebut antara lain rendahnya tingkat literasi digital sebagian masyarakat, khususnya pada kelompok usia lanjut yang belum terbiasa menggunakan aplikasi berbasis digital. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki telepon pintar yang memenuhi spesifikasi aplikasi IKD atau mengalami keterbatasan akses internet. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah adanya kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang tersimpan dalam aplikasi IKD. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih ragu untuk melakukan aktivasi meskipun telah mendapatkan sosialisasi dari petugas.

Disdukcapil Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa kelemahan internal dalam pelaksanaan program. Keterbatasan jumlah petugas yang menangani aktivasi IKD menjadi salah satu kendala utama, terutama ketika pelaksanaan layanan jemput bola dilakukan secara bersamaan di beberapa lokasi. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional juga memengaruhi intensitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan jemput bola karena membutuhkan dukungan biaya transportasi, peralatan, serta kebutuhan operasional lainnya.

3.3. Perumusan Strategi (Strategy Formulation)

Tabel 3.2
Perumusan Strategi dsdukcapil Bantul dalam Meningkatkan Aktivasi IKD

No	Strategi	Tujuan	Bentuk kegiatan
1.	Sosialisasi langsung	Meningkatkan pemahanan masyarakat tentang IKD	Penyuluhan di kalurahan, sekolah, dan kantor.
2.	Pelayanan jemput bola	Memperluas jangkauan aktivasi IKD	Layanan keliling dan pembukaan titik aktivasi diluar kantor.
3.	Pemanfaatan media digital	Menyebarluaskan informasi secara cepat dan luas	Konten instagram, tiktok, dan website resmi.
4.	Kerja sama lintas sektor	Mendukung percepatan aktivasi IKD.	Kolaborasi dengan DPRD, sekolah, dan pemerintah kalurahan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 3.2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merumuskan berbagai strategi untuk meningkatkan capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Perumusan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi internal organisasi, karakteristik masyarakat, serta peluang dan tantangan yang ditemukan pada tahap sebelumnya. Strategi yang dirumuskan berorientasi pada peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan aktivasi IKD

sekaligus mendukung percepatan transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu strategi utama yang dirumuskan adalah pelaksanaan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, fungsi, serta tata cara penggunaan IKD. Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai lokasi, seperti kantor kalurahan, sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, dan forum-forum masyarakat. Melalui sosialisasi tersebut, Disdukcapil berupaya mengurangi kesalahpahaman masyarakat mengenai IKD serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas digital dalam mendukung pelayanan publik berbasis elektronik.

Selain sosialisasi, Disdukcapil Kabupaten Bantul juga merumuskan strategi pelayanan jemput bola sebagai upaya memperluas jangkauan aktivasi IKD. Strategi ini dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi-lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, seperti kantor pemerintahan, sekolah, kampus, pusat pelayanan publik, hingga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Pelayanan jemput bola dipilih karena dinilai mampu mengatasi kendala akses masyarakat terhadap layanan aktivasi IKD. Dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat, proses aktivasi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program IKD.

Strategi lainnya yang dirumuskan adalah pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebaran informasi. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, Disdukcapil Kabupaten Bantul secara aktif memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan website resmi untuk menyampaikan informasi mengenai IKD. Pemanfaatan media digital dinilai penting karena mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat dibandingkan metode sosialisasi konvensional. Melalui berbagai konten edukatif, informasi mengenai manfaat IKD, prosedur aktivasi, serta jadwal pelayanan dapat diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja. Strategi ini juga menjadi bentuk adaptasi organisasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola komunikasi masyarakat yang semakin digital.

Kerja sama lintas sektor dilakukan dengan DPRD Kabupaten Bantul, pemerintah kalurahan, sekolah, perguruan tinggi, serta instansi pemerintah lainnya yang memiliki akses langsung kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut bertujuan memperluas jangkauan sosialisasi dan pelayanan aktivasi IKD sekaligus meningkatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting karena aktivasi IKD tidak hanya menjadi tanggung jawab Disdukcapil, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

3.3. Implementasi Strategi (Strategy Implementation)

Tabel 3.3
Implementasi Strategi dalam Meningkatkan Aktivasi IKD

No	Program	Pelaksanaan	Dampak
1.	Jemput bola	Dilaksanakan rutin di berbagai kelurahan dan acara publik	Aktivasi IKD meningkat secara signifikan.
2.	Sosialisasi publik	Dilakukan melalui tatap muka dan media digital berupa instagram, tiktok, dan website resmi.	Masyarakat lebih memahami manfaat IKD.
3.	Titik layanan aktivasi	Dibuka di lokasi strategis seperti kantor kelurahan,	Mempermudah akses aktivasi bagi masyarakat.

		pusat layanan publik, dan acara publik.	

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 3.3, Implementasi strategi merupakan tahap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pada tahap ini, strategi yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam bentuk tindakan nyata yang melibatkan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan berbagai pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi strategi dilakukan melalui tiga program utama, yaitu pelayanan jemput bola, sosialisasi publik, dan penyediaan titik layanan aktivasi.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, pelayanan jemput bola menjadi program yang paling intensif dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Bantul. Program ini dilakukan secara rutin dengan mendatangi berbagai lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, seperti kantor pemerintahan, sekolah, perguruan tinggi, pusat pelayanan publik, serta kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Pelaksanaan pelayanan jemput bola bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus mengatasi hambatan akses yang sering menjadi kendala dalam aktivasi IKD. Melalui program ini, masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil sehingga proses aktivasi dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien.

Selain pelayanan jemput bola, implementasi strategi juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi publik. Sosialisasi dilaksanakan baik secara langsung maupun melalui media digital. Sosialisasi secara langsung dilakukan dalam bentuk penyuluhan, penyampaian informasi pada forum masyarakat, serta pendampingan kepada masyarakat saat pelaksanaan layanan jemput bola. Sementara itu, sosialisasi melalui media digital dilakukan dengan memanfaatkan akun Instagram, TikTok, dan website resmi Disdukcapil Kabupaten Bantul. Pemanfaatan media digital memungkinkan informasi mengenai manfaat, tata cara aktivasi, serta jadwal pelayanan IKD dapat diakses oleh masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pelayanan, penggunaan media sosial terbukti membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan manfaat IKD sebagai identitas digital yang dapat digunakan dalam berbagai layanan administrasi kependudukan.

Dalam mendukung pelaksanaan program aktivasi IKD, Disdukcapil Kabupaten Bantul juga menyediakan titik-titik layanan aktivasi di berbagai lokasi strategis. Titik layanan tersebut dibuka di kantor kalurahan, pusat pelayanan publik, serta lokasi pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat. Keberadaan titik layanan ini memberikan alternatif bagi masyarakat yang belum sempat mengikuti kegiatan jemput bola maupun belum melakukan aktivasi di kantor Disdukcapil. Dengan semakin banyaknya lokasi pelayanan yang tersedia, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengakses layanan aktivasi IKD sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Hasil wawancara dengan operator pelayanan menunjukkan bahwa program jemput bola memberikan dampak yang paling signifikan terhadap peningkatan jumlah aktivasi IKD. Masyarakat dapat langsung melakukan aktivasi pada saat kegiatan berlangsung dengan didampingi oleh petugas, sehingga berbagai kendala teknis dapat segera diatasi. Selain itu, interaksi langsung antara petugas dan masyarakat juga memberikan kesempatan untuk menjelaskan manfaat IKD serta menjawab berbagai pertanyaan yang muncul. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program IKD dan memperbesar peluang masyarakat untuk melakukan aktivasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Bantul telah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan capaian aktivasi IKD. Hal ini terlihat dari peningkatan persentase aktivasi IKD yang semula sekitar 4,07% pada tahun 2023 menjadi 22,03% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa program-program yang

dilaksanakan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD. Meskipun demikian, pelaksanaan strategi masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas, ketersediaan jaringan internet di beberapa wilayah, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat.

3.4. Evaluasi dan Kontrol (Evaluation and Control)

Tabel 3.4

Evaluasi dan Kontrol Pelaksanaan Strategi

No	Aspek Evaluasi	Temuan	Tindak Lanjut
1.	Pencapaian target	Capaian aktivasi meningkat dari sekitar 4,07% (2023) menjadi 22,03% (2025), tetapi belum mencapai target nasional 30%.	Memperkuat strategi jemput bola dan sosialisasi digital.
2.	Kendala pelaksanaan	Keterbatasan internet, gawai, dan SDM yang terbatas.	Peningkatan edukasi masyarakat dan penambahan dukungan operasional.
3.	Evaluasi strategi	Jemput bola dinilai paling efektif karena langsung menjangkau masyarakat.	Memprioritaskan perluasan cakupan layanan keliling

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Evaluasi dan kontrol merupakan tahapan terakhir dalam manajemen strategi yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan strategi yang telah diimplementasikan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah perbaikan dan penyempurnaan strategi agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, evaluasi dilakukan melalui pemantauan capaian aktivasi IKD yang dilaporkan secara berkala oleh petugas pelayanan dan operator aktivasi. Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program, baik yang berasal dari faktor internal organisasi maupun faktor eksternal masyarakat. Kegiatan evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui efektivitas strategi yang telah diterapkan sekaligus memastikan bahwa seluruh program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Disdukcapil Kabupaten Bantul telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan aktivasi IKD. Hal ini terlihat dari peningkatan capaian aktivasi yang semula sekitar 4,07% pada tahun 2023 menjadi 22,03% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa berbagai strategi yang dijalankan, seperti pelayanan jemput bola, sosialisasi publik, pemanfaatan media digital, serta kerja sama lintas sektor mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil, yaitu sebesar 30%, sehingga diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan jumlah aktivasi pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam program tersebut. Sebagian informan mengaku belum memahami manfaat dan fungsi IKD dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, terdapat masyarakat yang belum memiliki telepon pintar yang sesuai dengan spesifikasi aplikasi IKD atau mengalami keterbatasan akses internet. Faktor lain yang cukup dominan adalah adanya kekhawatiran terkait keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang tersimpan dalam aplikasi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan aktivasi IKD tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan organisasi penyelenggara, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesiapan masyarakat dalam menerima transformasi digital pelayanan publik.

Hasil evaluasi juga menunjukkan adanya beberapa kendala yang memengaruhi pelaksanaan program aktivasi IKD. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama, terutama ketika pelaksanaan kegiatan jemput bola dilakukan secara bersamaan di beberapa lokasi. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional turut memengaruhi intensitas pelaksanaan sosialisasi dan pelayanan lapangan. Meskipun demikian, Disdukcapil Kabupaten Bantul terus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui pengaturan jadwal pelayanan yang efektif, pemanfaatan media digital, serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi jemput bola merupakan strategi yang paling efektif dalam meningkatkan aktivasi IKD. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan petugas pelayanan maupun masyarakat yang menyatakan bahwa layanan jemput bola mampu memberikan kemudahan akses serta membantu masyarakat memahami proses aktivasi secara langsung. Oleh karena itu, tindak lanjut yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bantul adalah memperluas cakupan pelayanan jemput bola, meningkatkan intensitas sosialisasi digital, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kalurahan, lembaga pendidikan, dan instansi lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian aktivasi IKD sekaligus mengatasi berbagai kendala yang masih dihadapi masyarakat.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan strategi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa penerapan manajemen strategi berperan penting dalam meningkatkan capaian aktivasi IKD. Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang diterapkan telah berjalan cukup baik melalui tahapan pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol. Temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi jemput bola menjadi strategi yang paling efektif dalam meningkatkan aktivasi IKD karena mampu menjangkau masyarakat secara langsung dan mengatasi keterbatasan akses pelayanan yang selama ini menjadi kendala. Keberhasilan strategi tersebut terlihat dari peningkatan capaian aktivasi IKD Kabupaten Bantul dari 4,07% pada tahun 2023 menjadi 22,03% pada tahun 2025.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putri et al., 2025) yang menunjukkan bahwa pelayanan jemput bola merupakan strategi yang efektif dalam mempercepat aktivasi IKD karena dapat mendekatkan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivasi IKD. Selain itu, penelitian ini juga mendukung temuan (Ahmadi et al., 2025) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan perangkat pendukung, serta kurangnya pemahaman mengenai manfaat IKD menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi program IKD. Kondisi tersebut juga ditemukan di Kabupaten Bantul, sehingga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi yang diterapkan.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan media digital melalui Instagram dan TikTok telah membantu penyebaran informasi mengenai IKD, namun efektivitasnya masih belum

optimal dibandingkan sosialisasi secara langsung. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan masih memerlukan dukungan literasi digital masyarakat agar informasi yang disampaikan melalui media digital dapat diterima dan dipahami secara lebih luas. Oleh karena itu, kombinasi antara pelayanan langsung dan pemanfaatan media digital menjadi pendekatan yang relevan dalam meningkatkan aktivasi IKD.

Karakteristik penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif Manajemen Strategi Wheelen dan Hunger untuk menganalisis proses peningkatan aktivasi IKD secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan aktivasi IKD tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan, merumuskan strategi yang sesuai, melaksanakan program secara konsisten, serta melakukan evaluasi dan pengendalian secara berkelanjutan. Temuan ini memperlihatkan bahwa strategi yang baik perlu didukung oleh kesiapan organisasi dan partisipasi masyarakat agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan berbagai penelitian terdahulu, terdapat beberapa temuan penting terkait strategi peningkatan aktivasi IKD, yaitu:

1. Strategi jemput bola menjadi pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan jumlah aktivasi IKD karena mampu menjangkau masyarakat secara langsung.
2. Sosialisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan fungsi IKD.
3. Rendahnya literasi digital masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan aktivasi IKD.
4. Pemanfaatan media sosial dapat memperluas jangkauan informasi, namun belum dapat menggantikan efektivitas sosialisasi secara langsung.
5. Kerja sama lintas sektor membantu memperluas cakupan pelayanan dan mendukung percepatan aktivasi IKD.
6. Evaluasi dan kontrol yang dilakukan secara berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas strategi dan keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah mampu meningkatkan capaian aktivasi IKD secara signifikan. Namun demikian, optimalisasi pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta perluasan penggunaan IKD dalam berbagai layanan publik masih diperlukan agar target aktivasi IKD dapat tercapai secara maksimal.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa temuan menarik yang memengaruhi pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bantul. Faktor penghambat yang paling dominan adalah rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan perangkat telepon pintar dan jaringan internet, serta kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat, kerja sama lintas sektor, komitmen pelaksana program, serta antusiasme sebagian masyarakat menjadi faktor pendukung peningkatan aktivasi IKD. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi jemput bola merupakan pendekatan yang paling efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara langsung, sehingga menunjukkan bahwa keberhasilan aktivasi IKD tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kedekatan pelayanan dengan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah berjalan cukup baik melalui tahapan pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol. Strategi yang diterapkan, khususnya pelayanan jemput bola, sosialisasi, pemanfaatan media digital, dan kerja sama lintas sektor, mampu meningkatkan capaian aktivasi IKD dari 4,07% pada tahun 2023 menjadi 22,03% pada tahun 2025. Namun, pelaksanaan strategi tersebut belum optimal karena masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan perangkat dan jaringan internet, serta keterbatasan sumber daya organisasi. Guna meningkatkan capaian aktivasi IKD, disarankan untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, mengoptimalkan kerja sama lintas sektor, meningkatkan pemanfaatan media digital, serta memperluas penggunaan IKD dalam berbagai layanan publik agar manfaat IKD dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga temuan yang diperoleh lebih menekankan pada kedalaman informasi dan perspektif informan terkait strategi peningkatan aktivasi IKD.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai aktivasi Identitas Kependudukan Digital masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian pada beberapa daerah dengan karakteristik yang berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi peningkatan aktivasi IKD. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap keberhasilan aktivasi IKD serta mengkaji tingkat pemanfaatan IKD dalam berbagai layanan publik

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan dan pihak yang telah membantu serta mendukung pelaksanaan penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, R., Erfina, E., Asad, M. A., Sapri, S., & Dema, H. (2025). Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang: Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, *7*(1), 86–94. https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i1.1178

Gong, Y., Yang, J., & Shi, X. (2020). Towards a comprehensive understanding of digital transformation in government: Analysis of flexibility and enterprise architecture. *Government Information Quarterly*, *37*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101487

Haryono, S., Wicaksono, R., & Mubarok, A. R. (2025). *Capaian IKD Baru 22,03 Persen, Disdukcapil Bantul Terus Dorong Percepatan Aktivasi*. https://timesindonesia.co.id/peristiwa-

daerah/559197/capaian-ikd-baru-2203-persen-disdukcapil-bantul-terus-dorong-percepatan-aktivasi

Hutasoit, I., Leokuna, D., & Simangungsong, F. (2020). LOCAL GOVERNMENT STRATEGIES IN IMPROVING THE INFORMATION TECHNOLOGYBASED INTEGRATED SERVICES IN SOUTH CENTRAL TIMOR REGENCY EAST NUSA TENGGARA PROVINCE. *Journal of Critical Reviews*, *7*(19). http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1186

Intan. (2024). *Rakornas Dukcapil se-Indonesia Tekankan Percepatan Aktivasi IKD di tahun 2024*. https://disdukcapil.surabaya.go.id/2024/03/04/rakornas-dukcapil-se-indonesia-tekankan-percepatan-aktivasi-ikd-di-tahun-2024/

Irani, Z., Abril, R. M., Weerakkody, V., Omar, A., & Sivarajah, U. (2023). The impact of legacy systems on digital transformation in European public administration: Lesson learned from a multi case analysis. *Government Information Quarterly*, *40*(1). https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101784

Jane Giroth, L. G., Pusung, P. H., Piere Tendean, N. R., & Megie Sumual, T. E. (2023). Human Capital Investment and Local Development in Digitalization Era. *KnE Social Sciences*, *2023*(8), 430–446. https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.13015

Luna, D. E., Vela, S. P., Buyannemekh, B., & Rayes, L. F. L. (2024). Creating public value through digital service delivery from a citizen's perspective. *Government Information Quarterly*, *41*(2). https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101928

Nuraeni, N., & Syahrudin, D. (2024). Efektivitas Pelayanan Pembuatan Identitas Kependudukan Digital(IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. *Karimah Tauhid*, *3*(1), 12653–12661. https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i11.15345

Putri, A. K., Syafirlana, F. I., Nisa, K., Widyawati, L. M., & Aufa, R. A. (2025). Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Percepatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Surabaya. *Journal of Governance Innovation*, *3*(1), 40–49. https://doi.org/https://doi.org/10.36636/jogiv.v7i1.5800

Scholl, H. J. (2021). The Digital Government Reference Library (DGRL) and its potential formative impact on Digital Government Research (DGR). *Government Information Quarterly*, *38*(4). https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101613

Scholta, H., & Lindgren, I. (2023). Proactivity in digital public services: A conceptual analysis. *Government Information Quarterly*, *40*(3). https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101832

Simangunsong, F. (2020). *REFORMASI BIROKRASI INDONESIA MENUJU PEMERINTAHAN KELAS DUNIA*. Inteligensia Media.

Simangunsong, F., & Hutasoit, I. (2011). Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat. *Intelingensia Media*.